



RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN

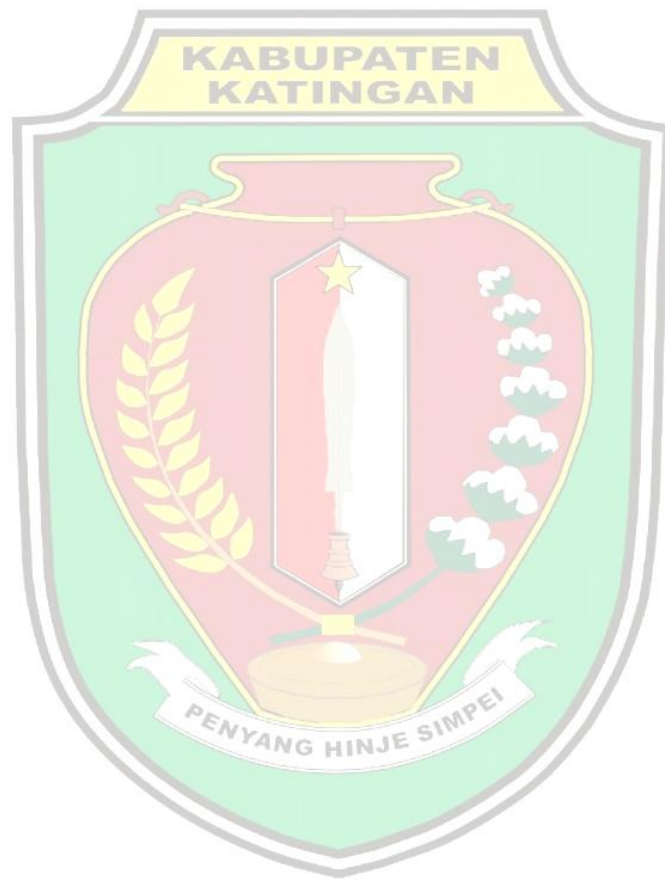
2025-2029



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KATINGAN



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025-2029**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Kesehatan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini.

Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Kasongan, 15 September 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan

Glorikus G.,SKM.,M.Kes.
NIP. 19710629 200003 1 001
Pembina Utama Muda (IV/a)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan	36
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2 Isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	56
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	66
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	75
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	125
BAB V PENUTUP	132
5.1 Kesimpulan	132
5.2 Kaidah Pelaksanaan	132
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah	20
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan	35
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	37
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	38
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Katingan	40
Tabel 2.7 Perumusan Isu Perangkat Daerah	52
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan	58
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Kesehatan Kab. Katingan	66
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Katingan.....	69
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan	74
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	76
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan	103
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	114
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	126
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.....	18
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Dinas Kesehatan Kab. Katingan	62
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Katingan	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019–2039;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045;
28. Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Katingan serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;

2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan dalam Pemberian Pelayanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia;
- e) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Katingan terkait dengan bidang kesehatan.
- g) Pembinaan dan pengendalian tentang surveilans penyakit menular dan penyakit tidak menular di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;
- h) Penyelidikan terhadap timbulnya kejadian luar biasa penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Katingan dan memiliki kesatuan epidemis;
- i) Penataan manajemen program imunisasi dan pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit menular;
- j) Penataan penemuan dan tatalaksana kasus penyakit menular;
- k) Penataan pengendalian faktor terjadinya penyakit tidak menular;
- l) Penatalaksanaan wilayah bencana dan kejadian luar biasa;
- m) Pembinaan dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- n) Penyelenggaraan surveilans gizi buruk dan pemantauan penanggulangan gizi;
- o) Pembinaan dan pelayanan kesehatan calon jemaah haji;
- p) Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;
- q) Pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan terpencil;
- r) Registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- s) Pengelolaan, penyelenggaraan dan bimbingan serta pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan;
- t) Pendayagunaan tenaga kesehatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan;
- u) Penyediaan dan pengelolaan obat dan alat-alat kesehatan;
- v) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan;
- w) Bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur, kriteria bidang kesehatan dan organisasi profesi tenaga kesehatan; dan
- x) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan profesi tenaga kesehatan.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan juga memiliki uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai berikut:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati Katingan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Pengorganisasian penyusunan program Pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c) Pelaksanaan pengendalian penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa serta pembinaan penyehatan lingkungan;
- d) Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional;
- e) Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi bagi tenaga kesehatan dalam skala Kabupaten Katingan;
- f) Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, dan teknologi kesehatan;
- g) Pembinaan dan peningkatan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- h) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

- i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai uraian tugas sebagai berikut yaitu:

- a) Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis Program Kerja Dinas Kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan instansi vertikal terkait Program Pembangunan Kesehatan, Pengolahan data dan informasi serta penelitian dan pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan di semua bidang di lingkungan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c) Merumuskan Kebijakan pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Dinas;
- d) Membina bawahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- e) Mengarahkan pelaksanaan proses manajemen berbagai program kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan petunjuk teknis yang berlaku;
- f) Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- g) Memberikan laporan dan informasi kepada atasan sesuai hasil kerja sebagai pedoman penilaian kinerja Dinas Kesehatan;
- h) Menggali berbagai informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas agar menambah wawasan dan pengetahuan dalam bertugas; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan memiliki tugas pokok mengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, protokol, hubungan masyarakat serta rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut:

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b) Merencanakan operasional kegiatan terkait proses manajemen di lingkungan Sekretariat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan tahun berjalan;
- c) Pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan;
- d) Pengawasan terhadap disiplin Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e) Mengawasi pelaksanaan proses kegiatan manajemen berbagai program kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja;
- f) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan olahraga;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan olahraga;

- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan olahraga;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan dan olahraga; dan
- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki tugas pokok melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa;
- d) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

- e) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- c) Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok membantu sekretaris dalam hal penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan rumah tangga serta penatalaksanaan hukum, dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas;
- c) Penyiapan bahan kegiatan kehumasan Dinas;
- d) Penyusunan analisa rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;
- e) Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas;
- f) Penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Dinas;
- g) Pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;
- h) Penyusunan daftar barang Dinas menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- i) Pelaksanaan dokumentasi dan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- j) Pelaksanaan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- k) Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
- l) Penyusunan dan analisa usulan penghapusan Aset Dinas;
- m) Penyusunan bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- n) Pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;

- o) Penyusunan usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- p) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- q) Pengelolaan administrasi perjalanan dinas di lingkup Dinas;
- r) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s) Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- t) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u) Pembagian pelaksanaan tugas dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- v) Penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- w) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

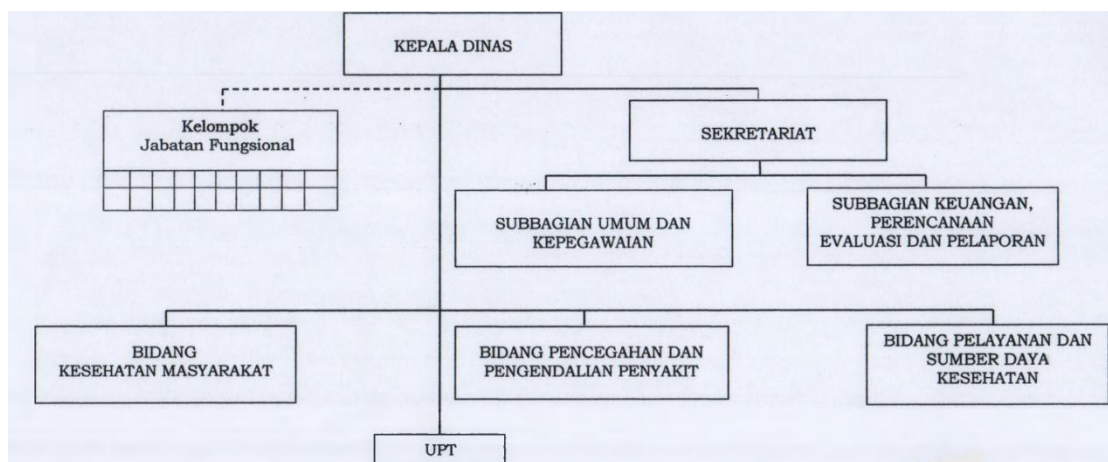
2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan dan koordinasi keuangan, pengelolaan aset, penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c) Pelaksanaan dan pengelolaan informasi teknologi di lingkungan Dinas;
- d) Penyiapan bahan penyusunan laporan;
- e) Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, serta pelaporan keuangan;

- f) Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h) Pengumpulan pengolahan dan penyajian data; dan
- i) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan memiliki sebanyak **1.305 pegawai**. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 9 Orang
3. Eselon IV : 12 Orang
4. Pejabat fungsional : 1.283 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berada dalam kondisi belum ideal. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebanyak **1.305 Orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 11 Orang
2. Sarjana S-1 : 429 Orang
3. Diploma 3 : 816 Orang
4. Diploma 1 : 1 Orang
5. SMA Sederajat : 47 Orang
6. SLTP Sederajat : 1 Orang

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang SMA Sederajat, yang mencerminkan keterbatasan dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	AC (Air Conditioner)	Baik		20
2	ACCU/Solar Sell	Baik		20
3	Alat Glukosa Test	Baik		1
4	Alat Pemeriksaan Hb (Bidan Kit)	Baik		16
5	Alat Penghancur Kertas (Mesin)	Baik		16
6	Alat Pengukur Kebisingan (Sanitarian Kit)	Baik		13
7	Alat Pengukur Kecepatan Aliran Udara (Sanitarian Kit)	Baik		13
8	Alat Pengukur Pencahayaan (Sanitarian Kit)	Baik		13
9	Alat Pengukuran Fisika Air TDS (Sanitarian Kit)	Baik		13
10	Alat Pengukuran Jumlah Kuman dalam Udara (Sanitarian Kit)	Baik		13
11	Alat Pengukuran Kimia Air Alumunium Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
12	Alat Pengukuran Kimia Air Ammonia/Amonia Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
13	Alat Pengukuran Kimia Air Arsenik Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
14	Alat Pengukuran Kimia Air Chloride/Klorida Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
15	Alat Pengukuran Kimia Air Chlorin/Sisa Klor Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
16	Alat Pengukuran Kimia Air Copper/Tembaga Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
17	Alat Pengukuran Kimia Air Cyanide/Sianida Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
18	Alat Pengukuran Kimia Air Flouride/Fluorida Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
19	Alat Pengukuran Kimia Air Hardness/Kesadahan Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
20	Alat Pengukuran Kimia Air Iron/Besi Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
21	Alat Pengukuran Kimia Air Klorium Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
22	Alat Pengukuran Kimia Air Manganese/Mangan Test (Sanitarian Kit)	Baik		13

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
23	Alat Pengukuran Kimia Air Nitrate/Nitrat (NO3) Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
24	Alat Pengukuran Kimia Air Sulphate/Sulfat Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
25	Alat Pengukuran Kimia Air Zink/Seng Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
26	Alat Pengukuran Mikrobiologi Air E Coli (Sanitarian Kit)	Baik		13
27	Alat Pengukuran Mikrobiologi Coliform (Sanitarian Kit)	Baik		13
28	Alat Pengukuran Parameter Kimia Air Nitrite/Nitrit (NO2) Test (Sanitarian Kit)	Baik		13
29	Alat Pengukuran Partikel dan Gas diudara (Sanitarian Kit)	Baik		13
30	Alat Resusitasi Tabung dan Sungkup/ Resusitasi Infant	Baik		4
31	Ambubag (bidan kit)	Baik		38
32	Antena SSB	Baik		1
33	Autoclave Sterilisasi (Set Sterilisasi)	Baik		9
34	B Medical Vaccine Refrigerator TCW 2000 AC And Accessories	Baik		1
35	Bak Sampah	Baik		32
36	Bangunan Rawat Inap Puskesmas Baun Bango	Baik		1
37	Basin Kidnew	Baik		1
38	Baurer Blood Pressure Monitor BM.58 (Set Posbindu Kit)	Baik		1
39	Bed Set Kabinet / Obsteric Manual /Tempat Tidur	Baik		1
40	Bed Set Kabinet / Obstetric Manual / Tempat Tidur	Baik		1
41	Bedah Minor Set	Baik		1
42	Bitmos Oxygen Concentrator Type OXY 5000 (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		9
43	Blood Cell Counter	Baik		9
44	Body Fat / Hidration Monitor Scale (Set Posbindu Kit)	Baik		66
45	Bodyform Infrared Ear dan Forehead Thermometer (Bidan Kit)	Baik		80
46	Bowl Stand	Baik		6
47	Brankas	Baik		21
48	Brite Manual Pull Down 84 (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
49	Calibrator Level 3 (Set Laboratorium)	Baik		8
50	Centrifuge	Baik		8
51	Colesterol (Set Laboratorium)	Baik		8
52	Colony Counter (Sanitarian Kit)	Baik		13
53	Control Level 2 (Set Laboratorium)	Baik		8
54	Creatinine (Set Laboratorium)	Baik		8
55	DVD	Baik		3
56	DVD Player	Baik		5
57	DVD Player + Microphone	Baik		16
58	Dental Instrument (Tang Cabut Gigi Dewasa Set) - (Set Kesehatan Gigi dan Mulut)	Baik		5
59	Dental Sunceon Set	Baik		1
60	Dental Unit	Baik		1
61	Dental Unit (Set Kesehatan Gigi dan Mulut)	Baik		8
62	Digital + Parabola	Baik		2
63	Dinamo Listrik	Baik		6

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
64	Dopler	Baik		16
65	Dopler LGT Multifungsi (bidan kit)	Baik		38
66	Doppler	Baik		10
67	Full Digital Color Doppler Ultrasonic (Alkes USG 2D)	Baik		5
68	Medical Fetal Doppler (Set IGD)	Baik		1
69	Pocket Fetal Doppler (Set Obsgyn)	Baik		12
70	Ultrasonic Pocket Doppler (Bidan Kit)	Baik		16
71	Fetal Doppler (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
72	Dressing Drum Medium (Set Pasca Persalinan)	Baik		5
73	Dressing Drum	Baik		1
74	Dressing Drum Medium (Bidan Kit)	Baik		16
75	Dressing Drum Medium (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		8
76	Dressing Drum White Coper	Baik		1
77	Electronic Baby Scale (Set Pasca Persalinan)			10
78	Electronic Baby Scale	Baik		10
79	Emergency Lamp	Baik		5
80	Emergency Set (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
81	Examination Lamp (Bidan Kit)	Baik		16
82	Examination Lamp (set kegawatdaruratan maternal neonatal)	Baik		9
83	Examination Table	Baik		8
84	Examination Table (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		8
85	Gynaecology Examination Table (set kegawatdaruratan maternal neonatal)		Rusak	10
86	Fenda Spekaer Portable (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
87	Fetal Doppler (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
88	Filling Cabinet	Baik		60
89	Filling Kabinet 4 Pintu	Baik		4
90	Filling Cabinet	Baik		31
91	Food Model (Set PROMKES)	Baik		8
92	Fotometer (Sanitarian Kit)	Baik		13
93	Genset	Baik		15
94	Genset (Generator)	Baik		10
95	Genset (Generator) Solar	Baik		6
96	Mesin Genset (Generator)	Baik		20
97	Genset (Generator) Gasoline		Rusak	3
98	Mesin Genset	Baik		11
99	Genset/Generator		Rusak	1
100	Glucosa PAP (Set Laboratorium)	Baik		8
101	Gunting Pembalut (Bidan Kit)	Baik		16
102	Gynaecology Examination Table (set kegawatdaruratan maternal neonatal)	Baik		10
103	HP Business Probok (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
104	HP Destop All In Now Window (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
105	HP Office 250 Mobile All In One (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
106	Haemocytometer	Baik		1
107	Hemoglobin (Set Laboratorium)	Baik		8
108	Hithaci	Baik		1
109	Incubator	Baik		4
110	Incubator Listrik			1
111	Incubator (Sanitarian Kit)	Baik		13
112	Incubator dengan Termostat Sederhana			1
113	Infant incubator			1
114	Incubator Bayi	Baik		7
115	Infocus + LCD Proyektor	Baik		11
116	Infocus Proyektor (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
117	Infusion Stand (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
118	Instrumen Cabinet (Set Laboratorium)	Baik		3
119	Instrument Cabinet (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
120	Instrument Set for Bidan Kit (Bidan Kit)	Baik		16
121	Instrument Tray Medium (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		12
122	Instrument Tray Small (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		8
123	Instrument Trolley (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		8
124	Instrument Trolley	Baik		3
125	Kaca Laring	Baik		6
126	Kaleng Perban	Baik		16
127	Kamera Pocket + Memory Card dan Tas Kamera	Baik		18
128	Kapal Motor (Pusling Air)	Baik		1
129	Kasur Busa	Baik		1
130	Komputer PC (Perangkat LAN)	Baik		9
131	Kulkas	Baik		17
132	Kulkas Vaksin			7
133	Kursi Lipat	Baik		648
134	Kursi Putar	Baik		45
135	Kursi Putar Hidrolik	Baik		16
136	Kursi Putar Pakai Lengan			1
137	Kursi Roda	Baik		28
138	Kursi Tunggu	Baik		102
139	Kursi Tunggu Pasien	Baik		58
140	Kursi Tunggu Pasien (4 Tempat Duduk)	Baik		52
141	Lampu Kepala	Baik		6
142	Lampu Periksa	Baik		28
143	Lampu Tindakan	Baik		10
144	Laptop	Baik		58
145	Laptop (Notebook)		Rusak	4
146	Laptop/Notebook	Baik		15

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
147	Laringoskop Dewasa	Baik		6
148	Laringoskop dewasa (Set IGD)		rusak	5
149	Laringoskop Enonates Bilah Lurus	Baik		6
150	Laringoskop anak	Baik		6
151	Laringoskop anak (Set IGD)		Rusak	5
152	Led Standing Examination Lamp (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
153	Lemari Arsip	Baik		46
154	Lemari Kayu	Baik		30
155	Lemari Kecil	Baik		12
156	Lemari Narkotika	Baik		6
157	Lemari Obat	Baik		78
158	Lemari Obat kecil	Baik		1
159	Lemari Rekam Medik	Baik		16
160	Lemari Obat 1 Pintu (Set Pasca Persalinan)	Baik		5
161	Measurina tape	Baik		1
162	Medicine Cabinet (Lemari Obat)	Baik		1
163	Medis Drainage Suction Unit Type Mevacs M20D (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		9
164	Megaphone	Baik		18
165	Megaphone/TOA		Rusak	4
166	Megaphone (pengeras suara)	Baik		57
167	Meja Geneacologi	Baik		1
168	Meja Instrument	Baik		4
169	Meja Kerja	Baik		377
170	Meja Kerja □ Biro			
171	Meja Kerja 1/2 Biro	Baik		135
172	Meja Kerja Standar (Laci 1 dan Lemari 1)			30
173	Meja Kerja Setara Kepala Seksi			1
174	Meja Periksa	Baik		9
175	Meja Periksa Pasien	Baik		32
176	Meja Periksa Tekukan	Baik		1
177	Mesin Alkon/ Ces	Baik		2
178	Mesin Diesel	Baik		2
179	Mesin Diesel /Dynamo		Rusak Ringan	1
180	Mesin Diezel	Baik		3
181	Mesin Genset	Baik		11
182	Mesin Genset (Generator)	Baik		20
183	Mesin Ketik	Baik		12
184	Mesin Pompa Air Pustu	Baik		27
185	Mesin Potong Rumput	Baik		5
186	Mesin Potong Rumput (Gendong)	Baik		7
187	Mesin Tik	Baik		16

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
188	Microscope	Baik		1
189	Mikroscope Binocular (Set Laboratorium)	Baik		3
190	Minor Surgeri	Baik		2
191	Mobil Ambulance	Baik		2
192	Mobile Stretcher (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
193	Mortex Free Powder Latex Surgical Gloves Sterile no.6,5 (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		18
194	Mortex Free Powder Latex Surgical Gloves Sterile no.7 (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		18
195	Mortex Free Powder Latex Surgical Gloves Sterile no.7,5 (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		18
196	Morton Silicone Infant Resuscitator (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		18
197	Nebulizer	Baik		48
198	Nebulizer + Masker	Baik		16
199	Operator Lamp	Baik		1
200	Orbital Shaker (Set Ruang Farmasi)	Baik		14
201	Otoskop	Baik		6
202	Oxigen teraphy	Baik		1
203	PC Unit	Baik		21
204	Panasonic HD Camcorder (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
205	Papan Data	Baik		16
206	Parameter Mikrobiologi Coliform (Sanitarian Kit)	Baik		13
207	Parameter Mikrobiologi E-Coli (Sanitarian Kit)	Baik		13
208	Paramount Bed Bassinet Cart (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		36
209	Paramount Bed Flat Bed (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		18
210	Paramount Bed I.V.Bed (Set Perawatan Paska Persalinan)	Baik		18
211	Pengukur Panjang Badan Bayi (bidan kit)	Baik		38
212	Peralatan Pengolah Data (Sanitarian Kit)	Baik		13
213	Personal Komputer (SIKDA)	Baik		6
214	Phantom Bayi Sehat (Set PROMKES)	Baik		8
215	Phantom Gigi Anak (Set PROMKES)	Baik		8
216	Phantom Menyusui Lengkap (Set PROMKES)	Baik		8
217	Phantom Panggul Melahirkan (Set PROMKES)	Baik		8
218	Phantom Torso Pria (Set PROMKES)	Baik		8
219	Phantom Torso Wanita (Set PROMKES)	Baik		8
220	Pinset Insisi Hordeolum	Baik		6
221	Pipet Mikro 100-1000 (Set Laboratorium)	Baik		8
222	Pipet Mikro 20-200 (Set Laboratorium)	Baik		8
223	Pipet Mikro 5-50 (Set Laboratorium)	Baik		8
224	Pipet Transfer/Sput (Sanitarian Kit)	Baik		13
225	Pisport Stainliss (pustu set)	Baik		32
226	Pispot Dewasa	Baik		16
227	Polindes Jahanjang	Baik		

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
228	Polindes Keruing	Baik		
229	Polindes Telaga	Baik		
230	Portable Suction / Aspirator (Bidan Kit)	Baik		16
231	Posbindu Lansia KIT	Baik		32
232	Printer	Baik		206
233	Puskesmas Baun Bango	Baik		
234	Pusling Air (Speed Boat)	Baik		2
235	Pusling Perairan (Klotok)	Baik		4
236	Radio Komunikasi Puskesmas	Baik		1
237	Radio SSB	Baik		11
238	Rak Ced	Baik		1
239	Rak Obat	Baik		24
240	Randox Laboratories RX Monza Photometer (Fotometer Lab 8 Puskesmas)	Baik		8
241	Ranjang Pasien	Baik		30
242	Ranjang Periksa Pasien	Baik		2
243	Ranjang Petugas	Baik		3
244	Ranjang Tidur Periksa	Baik		3
245	Ranjang Tidur Ruang Pasien	Baik		23
246	Ranjang Tidur Tempat Pasien	Baik		1
247	Reagensia Borax (Sanitarian Kit)	Baik		12
248	Reagensia Formaldehid (Sanitarian Kit)	Baik		13
249	Reagensia Methanyl Yellow (Sanitarian Kit)	Baik		13
250	Reagensia Rhodamin B (Sanitarian Kit)	Baik		13
251	Resusitas Set	Baik		1
252	Resusitator	Baik		1
253	Resusitator Anak dan Sungkup	Baik		6
254	Resusitator Bayi Standart	Baik		4
255	Resusitator Dewasa dan Sungkup	Baik		6
256	Resusitator Eonates dan Sungkup	Baik		6
257	Retraktor (Pembuka Kelopak Mata)	Baik		6
258	Rumah Dinas puskesmas	Baik		99
259	SGOT (Set Laboratorium)	Baik		8
260	SGPT	Baik		8
261	SSB Radio	Baik		18
262	Samsung 32 Inh Smart TV Led (Set Promosi Kesehatan)	Baik		8
263	Sentrifus Manual	Baik		16
264	Sepeda Motor	Baik		235
265	Silicone Manual Resuscitator Adult (Bidan Kit)	Baik		16
266	Sound System (Pengeras Suara)	Baik		16
267	Stainless Steel Wheel Chair (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		8
268	Standar Infus	Baik		30
269	Standar Waskom	Baik		53

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
270	Sterilisator (Pemanas Alkohol)	Baik		32
271	Sterilisator Kering (Set Kesehatan Gigi dan Mulut)	Baik		8
272	Sterilisator/pemanas alkohol (pustu set)	Baik		58
273	Suction Pump (Set Ruang Tindakan/UGD)	Baik		4
274	Suction Pump (alat pengisap)	Baik		6
275	Suction Pump Portable (set kegawatdaruratan maternal neonatal)	Baik		10
276	Tabung Oksigen	Baik		68
277	Tabung Oksigen + Trolley	Baik		16
278	Tabung Oksigen Besar	Baik		2
279	Tabung Oksigen Kecil	Baik		6
280	Tabung Oksigen dan regulator	Baik		10
281	Tabung Pemadam Kebakaran	Baik		26
282	Tandu Lipat	Baik		22
283	Tape Recorder	Baik		14
284	Tas Khusus Reagen Menggunakan Bahan Soft (Sanitarian Kit)	Baik		13
285	Tas Khusus untuk Menyimpan Pengujian (Sanitarian Kit)	Baik		13
286	Televisi	Baik	Rusak Ringan	
287	Televisi	Baik		52
288	Tempat Tidur Periksa + Tangga	Baik		2
289	Tensimeter Air Raksa	Baik		48
290	Tensimeter Air Raksa (pustu set)	Baik		58
291	Tensimeter Aneroid (bidan kit)	Baik		38
292	Tensimeter Digital (Bidan Kit)	Baik		24
293	Termometer Makanan (Sanitarian Kit)	Baik		13
294	Timbangan Bayi Digital	Baik		4
295	Timbangan Anak	Baik		6
296	Timbangan Badan + U tinggi	Baik		1
297	Timbangan Badan Dewasa (Hiban BMN)	Baik		12
298	Timbangan Dewasa	Baik		70
299	Timbangan Dewasa (Bidan Kit)	Baik		16
300	Timbangan Dewasa + Tinggi Badan	Baik		5
301	Timbangan Gantung	Baik		3
302	Tipe Wireless	Baik		1
303	Tong Air	Baik		5
304	Toples Kapas Logam	Baik		16
305	Trigliseride (Set Laboratorium)	Baik		8
306	Trolley	Baik		32
307	UPS (SIKDA)	Baik		6
308	UPS (perangkat jaringan)	Baik		96
309	USG 2 Dimensi (2D)	Baik		10
310	Ultrasonic Piezo Scaler	Baik		1
311	Ultrasonic Pocket Doppler (Bidan Kit)	Baik		16

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
312	Uric Acid (Set Laboratorium)	Baik		8
313	Urine Analyzer (Set Laboratorium)	Baik		8
314	Vaccine Carrier	Baik		17
315	Vaksin Carrier	Baik		8
316	White Board	Baik		2
317	Wireless (perangkat jaringan)	Baik		16

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Katingan

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan berada dalam kondisi **tidak layak guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,52	65,85	66,16	67,18	67,16	73,74	73,82	73,89	73,98	74,14	110,85	112,10	111,68	110,12	110,39
2.	Persentase Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Sesuai Standar (%)	35	40	45	50	60	64	83	90	43,75	63	182,9	207,5	200,0	87,5	105,0
3.	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	30	N/a	N/a	N/a	N/a	
4.	Angka Kematian Ibu (per 10.000 Kelahiran Hidup)	76	69	62	56	75	93	151,69	170,76	176,36	78,24	122,37	219,84	275,42	314,93	104,32
5.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,2	25,2	25,2	25,2	14	16	21,22	20	34	14,3	63,49	84,21	79,37	134,92	102,14
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (%)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	109 TT	109 TT	131 TT	131 TT	117 TT	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100	100	100	79,18	87,41	83,72	85,72	81,1	79,18	87,41	83,72	85,72	81,1
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	52,11	52,21	61,32	84,48	65,4	52,11	52,21	61,32	84,48	65,4
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100	100	100	83,26	85	78,54	83,46	78,6	83,26	85	78,54	83,46	78,6
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	83,31	53,48	62,9	75,12	70,0	83,31	53,48	62,9	75,12	70
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	44,89	52,24	90,47	91,4	96,6	44,89	52,24	90,47	91,4	96,6
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining	100	100	100	100	100	52,18	50,03	83,5	63,7	80,1	52,18	50,03	83,5	63,7	80,1

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kesehatan sesuai standar (%)															
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	90,57	28,16	57,98	85	94,7	90,57	28,16	57,98	85	94,7
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	53,13	70,7	83,22	84,2	92,6	53,13	70,7	83,22	84,2	92,6
11.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	47,27	78,95	92,02	101,5	99,6	47,27	78,95	92,02	101,5	99,6
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	84,88	81,3	90,6	116,7	100	84,88	81,3	90,6	116,7	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	100	100	100	100	100	50	76,31	80,72	81,2	88,8	50	76,31	80,72	81,2	88,8

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pelayanan TBC sesuai standar (%)															
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	67,52	57,39	83,12	83,6	87,1	67,52	57,39	83,12	83,6	87,1
Standar Pelayanan Minimal (SPM)																
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	100	100	100	100	79,18	87,41	83,72	85,72	81.1	79,18	87,41	83,72	85,72	81.1
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	100	100	100	100	100	52,11	52,21	61,32	84,48	65.4	52,11	52,21	61,32	84,48	65.4
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100	100	100	100	100	83,26	85	78,54	83,46	78.6	83,26	85	78,54	83,46	78.6
4.	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100	100	100	100	100	83,31	53,48	62,9	75,12	87.0	83,31	53,48	62,9	75,12	87.0
5.	Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar (%)	100	100	100	100	100	44,89	52,24	90,47	91,4	96.6	44,89	52,24	90,47	91,4	96.6
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%)	100	100	100	100	100	52,18	50,03	83,5	63,7	80.1	52,18	50,03	83,5	63,7	80.1
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (%)	100	100	100	100	100	90,57	28,16	57,98	85,0	94.7	90,57	28,16	57,98	85	94.7

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100	100	100	100	100	53,13	70,7	83,22	84,2	92,6	53,13	70,7	83,22	84,2	92,6
9.	Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus (%)	100	100	100	100	100	47,27	78,95	92,02	101,5	99,6	47,27	78,95	92,02	101,5	99,6
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	100	100	100	100	84,88	81,3	90,6	116,7	100	84,88	81,3	90,6	116,7	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)	100	100	100	100	100	76,31	80,72	80,72	81,2	88,8	76,31	80,72	80,72	81,2	88,8
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (%)	100	100	100	100	100	67,52	57,39	83,12	83,6	87,1	67,52	57,39	83,12	83,6	87,1

Sumber: Bidang pada Dinas Kesehatan Kab. Katingan (Diolah)

Dari Tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup berhasil, meskipun ada beberapa indikator yang masih perlu dilakukan peningkatan capaian. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja yang relatif mengalami kenaikan capaian kinerja, sehingga menggambarkan adanya upaya yang berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun mendukung kelancaran fungsi pemerintahan daerah.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Katingan**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Belanja	157.191.860.597,40	248.255.447.513,00	194.443.886.689,00	257.698.596.766,00	369.060.754.700,00	148.515.517.689,70	207.196.140.709,48	180.869.725.416,39	249.289.516.761,33	354.155.998.444,56	94,48	83,46	93,02	96,74	95,96
Belanja Operasi	128.370.393.111,26	188.313.597.380,00	161.781.176.838,00	177.625.444.664,00	212.273.672.553,19	123.606.375.798,70	150.446.009.234,88	148.771.299.901,39	170.796.952.606,34	198.455.509.943,56	96,29	79,89	91,96	96,16	93,49
- Belanja Pegawai	68.570.505.306,34	61.366.178.059,00	64.027.684.452,00	66.419.055.235,00	99.055.919.077,00	67.572.000.827,00	59.380.037.616,40	63.537.819.840,00	65.575.712.352,00	87.438.762.352,00	98,54	96,76	99,23	98,73	88,27
- Belanja Barang dan Jasa	59.799.887.804,92	120.223.134.781,00	97.553.492.386,00	110.756.389.429,00	112.667.753.476,19	56.034.374.971,70	84.342.122.478,48	85.033.500.061,39	104.771.240.254,34	110.466.747.591,56	93,70	70,15	87,17	94,60	98,05
- Belanja Hibah	-	-	200.000.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00			199.980.000,00	450.000.000,00	550.000.000,00	-	-	99,99	100,00	100,00
- Belanja Bantuan Sosial		6.724.284.540,00	-	-			6.723.849.140,00				-	99,99	-	-	-
Belanja Modal	28.821.467.486,14	59.941.850.133,00	32.662.709.851,00	80.073.152.102,00	156.787.082.146,81	24.909.141.891,00	56.750.131.474,60	32.098.425.515,00	78.492.564.154,99	155.700.488.501,00	86,43	94,68	98,27	98,03	99,31
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.952.577.914,88	25.629.068.205,00	13.182.442.020,00	17.782.678.460,00	71.862.651.646,81	19.497.867.484,00	23.500.643.219,60	12.803.004.781,00	17.408.776.252,99	71.505.071.315,00	93,06	91,70	97,12	97,90	99,50
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.868.889.571,26	33.532.816.928,00	18.092.267.831,00	62.290.473.642,00	83.774.430.500,00	5.411.274.407,00	33.199.990.246,00	17.913.570.734,00	61.083.787.902,00	83.050.645.685,00	68,77	99,01	99,01	98,06	99,14
- Belanja Midat Jalan, Jaringan dan Irigasi		779.965.000,00	1.388.000.000,00	-	1.150.000.000,00		49.498.009,00	1.381.850.000,00	0	1.144.771.501,00	-	6,35	99,56		99,55

Sumber: Sub Bagian KPEP

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Kesehatan Kab. Katingan selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Kesehatan Masyarakat	Pelayanan/Skrining pada Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Dasar
2.	Kesehatan Masyarakat	Pelayanan/Skrining Kesehatan Remaja	Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas
3.	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Pelayanan/skrining Kesehatan Usia Produktif dan lanjut usia	Kelompok Usia Produktif dan Usia Lanjut
4.	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	Kelompok Ibu Hamil dan Bersalin
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Kelompok Bayi dan Balita

Sumber: Diolah

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam pada periode ini. Setiap penyelenggaraan layanan oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Kesehatan Kab. Katingan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Katingan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Katingan:

Tabel 2.5 Mitra Dinas Kesehatan Kab. Katingan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BPOM	Pengawasan obat dan makanan	Meningkatkan kualitas ketersediaan obat dan makanan minuman
2.	Kementerian Agama	Pemeriksaan kesehatan jamaah haji	Terlaksananya layanan kesehatan haji
3.	Bapelkes	Penyelenggara Pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM
4.	Badan Narkotika Nasional/BNNK	Penyalanggunaan NAPZA dan Obat-Obatan Terlarang	Mendukung pemberantasan penggunaan obat-obatan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
			terlarang/pisikotropika di Kabupaten
5	Dinas Sosial Kab. Katingan	Kepesertaan BPJS dan Penanganan ODGJ	Mendukung pencapaian kepesertaan BPJS dan penanganan ODGJ
6.	Dinas DP3AP2KB Kab. Katingan	Kerjasama pelayanan Kesehatan KIA/KB	Mendukung pelayanan Kesehatan KIA/KB
7.	Badan Gizi Nasional	Penyelenggaraan Makan Gizi Gratis	Mendukung peningkatan Pemenuhan Gizi Nasional

Sumber: Bidang PKSDK dan P2P Dinas Kesehatan Kab. Katingan

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem

dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan dalam penyelenggaraan pelayanan yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

**Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Kesehatan Kab. Katingan**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Usia Harapan Hidup yang perlu ditingkatkan	1. Pemenuhan gizi seimbang perlu ditingkatkan. 2. Jangkauan akses Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita khususnya pada Masyarakat Miskin masih perlu ditingkatkan 3. Sistem data terintegrasi terkait	1. Belum meratanya pemenuhan gizi seimbang 2. Angka Kematian bayi masih tinggi. 3. Belum efektifnya pelayanan Kesehatan berkualitas yang merata. 4. Belum optimalnya kesadaran Masyarakat dalam hidup bersih dan sehat.
2.	Belum optimalnya pelayanan terhadap kondisi ibu saat dan pasca melahirkan	Kesehatan ibu, bayi dan balita perlu dikembangkan.	1. Masih adanya ibu yang melahirkan tidak di fasilitas Kesehatan. 2. Distribusi sarana dan prasarana

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			kesehatan yang belum merata. 3. Akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang.
3.	Penanganan stunting perlu lebih holistik dan terintegrasi		1. Fluktuasi tinggi angka ibu hamil dengan KEK. 2. Kurangnya pemenuhan gizi pada 1.000 HPK 3. Belum optimalnya koordinasi antarsektor dalam penanganan <i>stunting</i>
4.	Belum optimal penanganan penyakit menular (tuberculosis, HIV/AIDS, DBD, diare) dan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Mellitus, Hipertensi, Kanker, Penyakit Cardio Vaskuler dan Gangguan Jiwa)	Jangkauan Akses pelayanan Kesehatan Khususnya pada pencegahan dan penanganan terhadap penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular masih perlu ditingkatkan.	1. Cakupan penanganan TBC yang masih rendah 2. Adanya kasus TBC dengan pengobatan belum optimal. 3. Belum optimalnya penanganan penyakit tidak menular.

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	yang mengancam Masyarakat.		
5.	Belum semua Masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jangkauan Akses Kesehatan Khususnya pada Masyarakat Miskin berpenghasilan rendah masih perlu ditingkatkan agar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1. Masih terdapat penduduk yang belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3. Belum semua Masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
6.	Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan dan	Jangkauan Akses Kesehatan yang memerlukan	Tidak semua sarana pelayanan Kesehatan memiliki

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	kualitas SDM Kesehatan	optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM tenaga Kesehatan masih perlu ditingkatkan.	9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
7.	Belum semua Puskesmas terakreditasi Paripurna	Optimalisasi akses pelayanan dan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	Fasilitas pelayanan Kesehatan yang belum optimal yang berkaitan dengan mutu pelayanan (sarana dan prasarana).
8.	Cakupan imunisasi lengkap yang masih rendah dan belum merata.	Peningkatan cakupan jangkauan imunisasi lengkap.	Masih kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya imunisasi.

Sumber: Diolah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun

tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Kesehatan Kab. Katingan didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Katingan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Kesehatan Kab. Katingan adalah sebagai berikut:

1. Penyakit Menular dan Tidak Menular Global.
2. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan.
3. Isu Kesehatan Mental di Era Digital.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional. Adapun isu strategis K/L yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Katingan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan

- kesehatan reproduksi;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 3. Perbaikan sistem pengendalian penyakit;
 4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 5. Penguatan sistem kesehatan.

Dalam mendukung kebijakan tersebut di atas, salah satu upaya yang dilakukan Kemenkes adalah melaksanakan transformasi sektor kesehatan. Transformasi bertujuan untuk akselerasi pencapaian sasaran prioritas program transformasi nasional bidang kesehatan di 6 (enam) pilar yang terdiri dari: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi digital dan teknologi kesehatan.

Keenam kategori pilar utama ini yang akan menjadi arah prioritas Kemenkes RI dalam melaksanakan transformasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang 6 pilar transformasi kesehatan:

- Transformasi Layanan Primer : Fokus pada peningkatan aktivitas promotif dan preventif, skrining kesehatan, dan peningkatan kapasitas layanan primer di Puskesmas dan Posyandu, dengan tujuan menciptakan lebih banyak orang sehat.
- Transformasi Layanan Rujukan: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan rujukan, memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat di fasilitas kesehatan yang sesuai, serta akses yang mudah dan terjangkau.
- Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan: Memperkuat sistem kesehatan agar lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk wabah penyakit dan krisis kesehatan. (terkait Standar Pelayanan Minimal).
- Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan : Memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan terjangkau, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan fokus pada ketersediaan, kecukupan, dan

efisiensi pembiayaan. Tercapainya Universal Health Coverage (UHC) adalah program jaminan kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu kepada seluruh masyarakat UHC juga dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Semesta

- Transformasi SDM Kesehatan: Meningkatkan jumlah, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, melalui peningkatan kuota mahasiswa kedokteran dan pelatihan SDM kesehatan.
- Transformasi Teknologi Kesehatan: Mengintegrasikan teknologi kesehatan dengan regulasi inovasi bioteknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengobatan yang presisi.

Transformasi kesehatan ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat dan maju, dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan. Sedangkan Proyek Strategi Nasional yaitu pembangunan Rumah Sakit lengkap dan berkualitas serta penuntasan penyakit TBC. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyusun program strategis untuk mendukung pencapaian Asta Cita. Asta Cita merupakan cetak biru bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada delapan misi strategis, pemerintah berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2.2.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Katingan, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Tengah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Katingan perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kab. Katingan:

1. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan bencana serta Beban ganda penyakit-pergeseran pola penyakit dari Penyakit Menular ke Penyakit Tidak Menular
2. Masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) menurut standar SDGs
3. Lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
4. Belum optimalnya penanganan masalah gizi (stunting)
5. Belum optimalnya jumlah, jenis, kualitas, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya manusia Kesehatan
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat UKBM-PHBS
7. Masih rendahnya akses terhadap kualitas lingkungan sehat
8. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan
9. Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan dan minimnya sarana dan prasarana yang menunjang sistem informasi kesehatan.

2.2.2.4 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Dinas

Kesehatan Kab. Katingan yaitu **Perbaikan Kesehatan dan Kualitas Hidup**.

2.2.2.5 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Katingan. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Katingan, perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Katingan agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan yaitu **Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas hidup**. Penetapan isu strategis ini didasarkan pada permasalahan–permasalahan prioritas yang selaras dengan arahan pembangunan Tema 1 RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045. Identifikasi isu strategis tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan program, tetapi juga sebagai panduan untuk memastikan pembangunan Kabupaten Katingan berjalan secara selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Katingan

dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
Dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pembangunan kesehatan	Tidak semua sarana pelayanan kesehatan memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Perbaikan kesehatan dan kualitas hidup	Memastikan hidup sehat dan kesejahteraan bagi semua usia	Ketimpangan kualitas kesehatan	Rendahnya kualitas dan daya saing SDM	Belum Optimalnya Jenis, Jumlah, dan Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan.
Wilayah Kabupaten Katingan yang berbatasan dengan ibukota provinsi dan ibukota kabupaten lain yang lebih maju dapat memberikan peluang untuk pengembangan pelayanan dan kerjasama dalam bidang kesehatan	Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada belum optimalnya kualitas lingkungan, seperti kurangnya sarana pembuangan sampah/limbah pada sarana umum, masih kurangnya jumlah saluran pembuangan air limbah di pemukiman, sampah pemukiman yang belum dikelola dengan baik					Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam hidup bersih dan sehat
Adanya komitmen eksekutif dan legislatif untuk mengalokasikan pembiayaan kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Daerah	Masih ditemukan kasus kematian ibu dan anak					- Masih adanya Kematian Ibu dengan penyebab <i>avoidable</i>

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
di Kabupaten Katingan yang memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan rentan yang tidak tercakup program JKN						- Masih adanya kasus kematian balita
	Masih ditemukannya balita stunting					Masih adanya kasus gizi buruk dan <i>Stunting</i> pada balita
	Cakupan Imunisasi yang masih rendah dan belum merata					Masih kurangnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi
	Masih banyaknya penyakit endemis, Penyakit Tidak Menular dan penyakit menular					- Masih banyaknya penyakit endemis dan penyakit menular lainnya (TBC, DBD, HIV/AIDS, diare) - Penyakit tidak menular (PTM) seperti DM, Hipertensi, Kanker, penyakit cardio vaskuler dan gangguan jiwa makin mengancam masyarakat

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Dinas Kesehatan
			Global	Nasional	Regional	
	Masih terdapat penduduk yang masih belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi peserta jaminan kesehatan nasional.					Masih banyak penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan.
Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	Belum semua Puskesmas Terakreditasi Paripurna					Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal mutu pelayanannya terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Sumber: Diolah

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan disajikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya jenis, jumlah dan pemerataan dan kualitas SDM Kesehatan.
2. Belum optimalnya kesadaran Masyarakat dalam Hidup Bersih dan Sehat.
3. Masih adanya kematian Ibu dengan penyebab *avoidable*.
4. Masih ditemukan kematian balita.
5. Masih adanya kasus gizi buruk dan *Stunting* pada balita.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi.
7. Masih banyaknya penyakit endemis dan penyakit menular lainnya (TBC, DBD, HIV/AIDS).
8. Masih banyaknya Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Penyakit Cardio Vaskuler dan gangguan jiwa semakin mengancam masyarakat.
9. Masih banyak penduduk yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan.
10. Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal mutu pelayanannya terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

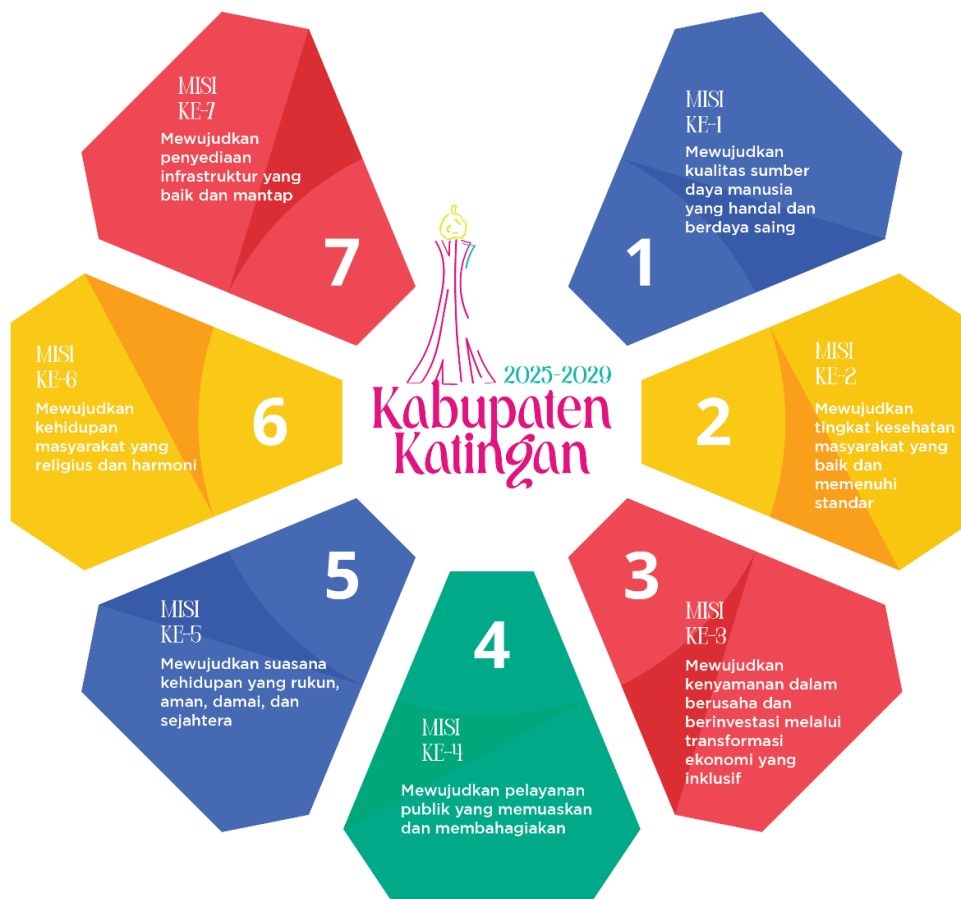
Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Katingan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

KABUPATEN KATINGAN

Terwujudnya Kabupaten Katingan yang Maju,
Sejahtera, Berkeadilan, dan Berakhlak Mulia

Adapun misi Kabupaten Katingan dalam mendukung tercapainya visi tersebut yaitu pada gambar berikut :



Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029

Dinas Kesehatan Kab. Katingan berperan dalam mendukung misi ke-2 yaitu ***“Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar”***, tujuan ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”*** dan sasaran ***“Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas”*** dari RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Kesehatan Kab. Katingan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kab. Katingan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan											
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas		Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,14	74,20	74,28	74,35	74,43	74,50	74,58	
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan yang Didukung oleh Tata Kelola Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Kematian Ibu (Jumlah)	2	2	2	2	2	2	2	
			Jumlah Kematian Balita (Jumlah)								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	19,60	19,10	18,25	17,40	16,55	15,70	14,85	
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	98,42	98,50	98,93	99,00	99,50	99,80	100,00	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	44,56	54,30	64,04	73,78	83,51	93,25	102,99	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	68,06	73,10	78,14	83,18	88,21	93,25	98,29	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP (Predikat)	62,00	62,00	63,00	65,00	66,00	67,00	71,00	

Sumber: Diolah

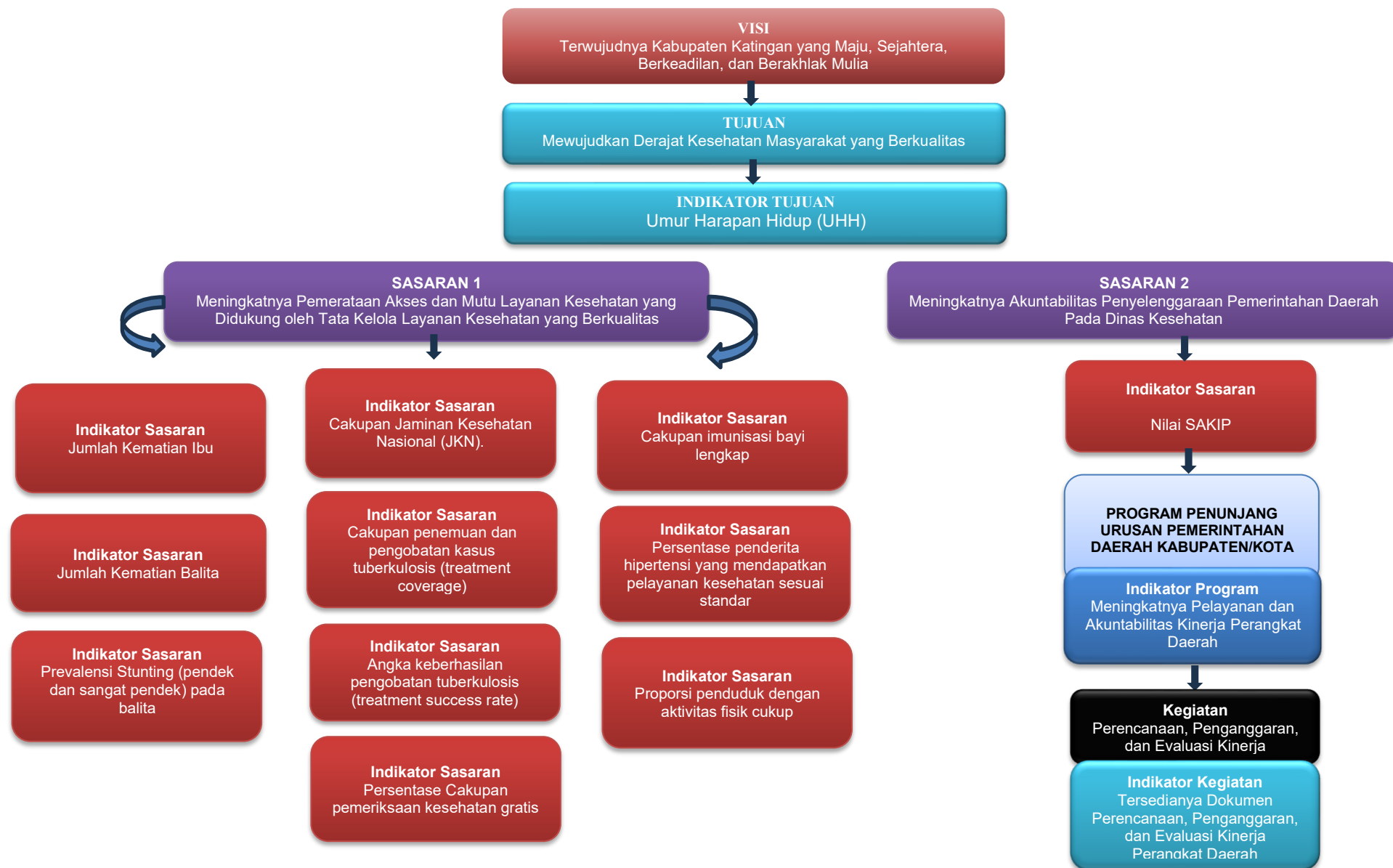
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Kesehatan Kab. Katingan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Gambar. 3.2
LOGICAL FRAMEWORK DINAS KESEHATAN KABUPATEN

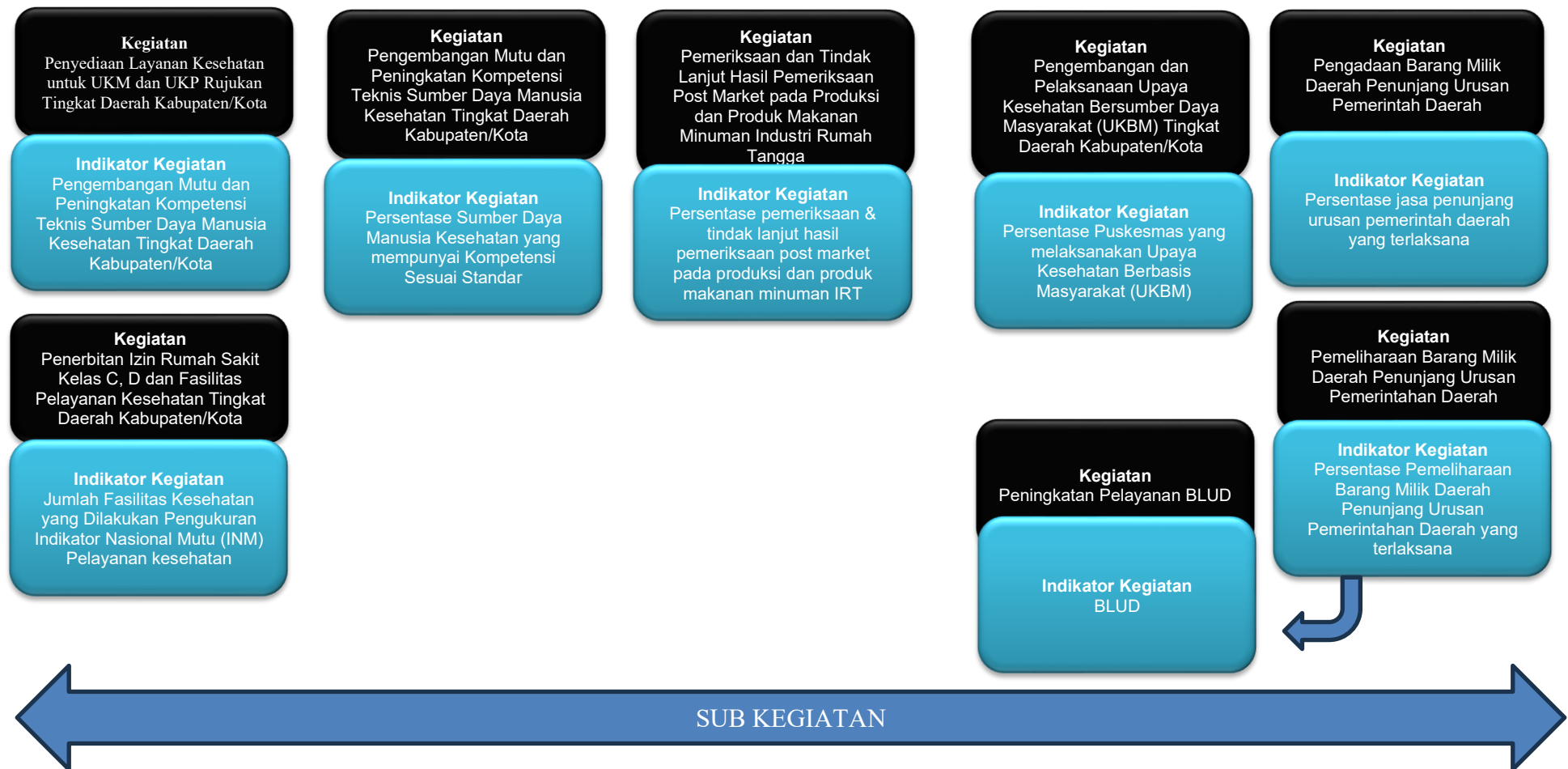
VISI	
Terwujudnya Kabupaten Katingan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berakhlak Mulia	
MISI	
<i>Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar</i>	
TUJUAN	
Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	
INDIKATOR TUJUAN	
Umur Harapan Hidup (UHH)	
SASARAN	
Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan yang Didukung oleh Tata Kelola Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kesehatan
INDIKATOR SASARAN	
Jumlah Kematian Ibu (Jumlah)	Nilai SAKIP (Predikat)
Jumlah Kematian Balita (Jumlah)	
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (%)	
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	
Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	

Sumber : Diolah

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. KATINGAN TAHUN 2025-2029







Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Katingan

Sumber: diolah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Dinas Kesehatan Kab. Katingan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, strategi Dinas Kesehatan Kab. Katingan juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Kesehatan Kab. Katingan, yang meliputi antara lain :

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Kesehatan Kab. Katingan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya Upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat Kab. Katingan	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Peningkatan pelayanan Kesehatan dalam mewujudkan derajat Kesehatan yang berkualitas
2	Angka Kematian Ibu dan anak masih belum teratasi dengan efisien		Peningkatan sistem kesehatan melalui penguatan pelayanan primer dalam mendeteksi faktor resiko
3	Prevalensi stunting masih tinggi		Intervensi spesifik dan sensitif yang

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
			terintegrasi lintas sektor, dengan prioritas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
4	Penanganan Tuberkulosis yang belum optimal		- Melakukan pendekatan terpadu berbasis komunitas - Penguatan layanan diagnosis dan pengobatan
5	Cakupan kepesertaan JKN belum optimal		Peningkatan perluasan segmen dan digitalisasi layanan peserta JKN
6	Belum optimalnya penanganan penyakit Menular dan tidak menular		Mengintegrasikan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan digital, dengan penguatan tata kelola lintas sektor dan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
			partisipasi masyarakat.
7	Distribusi tenaga Kesehatan yang tidak merata		- Penguatan Kapasitas dan Retensi SDM - Penataan Kembali sebaran tenaga Kesehatan yang tidak merata
8	Kurangnya kesadaran Masyarakat hidup bersih dan sehat		Penguatan edukasi berbasis komunitas, digitalisasi kampanye, dan integrasi lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Katingan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra

PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Kesehatan Kab. Katingan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kab. Katingan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan	Fasilitas pelayanan Kesehatan yang belum optimal yang berkaitan dengan mutu pelayanan (sarana dan prasarana).	Peningkatan pelayanan, Akreditasi Puskesmas, sarana dan prasarana kesehatan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Katingan	1. Masih adanya ibu yang melahirkan tidak di fasilitas Kesehatan 2. Distribusi sarana dan prasarana kesehatan yang belum merata. 3. Akses terhadap sarana dan	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
				prasarana kesehatan yang masih kurang.		
				4. Fluktuasi tinggi angka ibu hamil dengan KEK. 5. Kurangnya pemenuhan gizi pada 1.000 HPK 6. Belum optimalnya koordinasi antarsektor dalam penanganan <i>stunting</i>	Penurunan Angka Stunting	
		Peningkatan jangkauan pemeriksaan dan penanganan penyakit epidemi	Meningkatkan jangkauan dan akses pelayanan kesehatan	1. Belum efektifnya pelayanan Kesehatan berkualitas yang merata. 2. Belum optimalnya kesadaran Masyarakat dalam hidup bersih dan sehat.	Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			Meningkatkan upaya terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular	1. Cakupan penanganan TBC yang masih rendah 2. Adanya kasus TBC dengan pengobatan belum optimal.	Peningkatan Penanganan Pencegahan dan Pengendalian penyakit (TB Paru,DBD, HIV/AIDS dan diare)	
		Peningkatan pencegahan dan pelayanan pengobatan penyakit tidak menular	Meningkatkan upaya terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit Tidak Menular	Belum optimalnya penanganan penyakit tidak menular.	Penguatan transformasi layanan primer melalui promosi kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit	
		Peningkatan pelayanan kesehatan mental			Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar	
		Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	1. Masih terdapat penduduk yang belum merekam data kependudukan sehingga belum bisa menjadi	Peningkatan kepesertaan JKN	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
				peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Belum semua Masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		
		Pemerataan sebaran tenaga kesehatan	Optimalisasi distribusi tenaga kesehatan	Tidak semua sarana pelayanan Kesehatan memiliki 9 jenis	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Kabupaten Katingan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
				tenaga kesehatan sesuai standar.		
		Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kualitas dan kuantitas SDM tenaga Kesehatan masih perlu ditingkatkan.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

Sumber: Diolah

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

**Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kab. Katingan**

TAHP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan kesehatan	Pengembangan Program Berbasis Teknologi dan Komunitas	Pelayanan Kesehatan yang Memadai dan Masyarakat yang Sehat
1.Menguatkan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan penyiapan sarana Dokter Keliling	1.Operasionalisasi Dokter Keliling	1.Mengevaluasi efektivitas program kesehatan dan Dokter Keliling	1. Memperluas cakupan Dokter Keliling disertai pemanfaatan teknologi informasi	1. Memastikan keberlanjutan program kesehatan yang telah berjalan
2.Meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular	2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan spesialis dan ketersediaan peralatan medis di rumah sakit	2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan preventif	2.Mengembangkan program kesehatan berbasis komunitas	2.Memperkuat kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan

Sumber: Diolah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kesehatan Kab. Katingan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Katingan mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Katingan, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kab. Katingan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
- Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas				Umur Harapan Hidup (Tahun)		
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan yang Didukung oleh Tata Kelola Layanan Kesehatan yang Berkualitas			Jumlah Kematian Ibu (Jumlah)		
					Jumlah Kematian Balita (Jumlah)		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))		
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))		
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)		
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)		
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)		
					Jumlah Kematian Ibu (Jumlah)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya output	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				tersedianya output	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				tersedianya output	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas		
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	
				tersedianya output	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Persentase Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten yang disediakan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	1.02.02.2.02.0043 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
						1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro Tradisional yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Persentase Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
				Persentase pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Persentase Posyandu Aktif	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Persentase Puskesmas yang menerapkan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)		
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP (Predikat)		
					Nilai LAKIP (Skor)	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan							
				BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Sumber:Diolah

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Katingan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					281.667.450.000,00		299.459.640.000,00		312.087.045.000,00		325.631.418.000,00		342.653.949.000,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					133.132.459.232,00		137.126.433.000,00		139.240.225.000,00		141.417.432.000,00		143.659.955.000,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62,00	62,00	63,00	133.132.459.232,00	65,00	137.126.433.000,00	66,00	139.240.225.000,00	67,00	141.417.432.000,00	71,00	143.659.955.000,00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					143.781.882.752,00		157.152.321.000,00		167.199.654.000,00		178.058.575.000,00		192.284.596.000,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Jumlah)	78,24	77,00	75,00	143.781.882.752,00	74,00	157.152.321.000,00	72,00	167.199.654.000,00	70,00	178.058.575.000,00	69,00	192.284.596.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	19,60	19,10	18,25		17,40		16,55		15,70		14,85		
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	6,00	5,80	5,60		5,40		5,20		5,00		4,80		
	Persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	50,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	22,50	23,00	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70,00	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	80,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	60,00	75,00	85,00		90,00		95,00		98,00		100,00		
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	30,00	40,00	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	70,00	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	-	-	-		-		-		-		-		
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-	60,00	62,00		64,00		66,00		69,00		71,00		
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	9,00	8,80	8,50		8,30		8,00		7,70		7,40		
	Penemuan Kasus TBC (%)	70,00	75,00	80,00		83,00		86,00		88,00		90,00		
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	0,86	0,86	0,86		0,86		0,86		0,86		0,86		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Cakupan Imunisasi HPV		90			90		90		90		90		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.908.600.266,00		3.170.374.000,00		3.455.707.000,00		3.766.721.000,00		4.105.726.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100,00	100,00	100,00	2.908.600.266,00	100,00	3.170.374.000,00	100,00	3.455.707.000,00	100,00	3.766.721.000,00	100,00	4.105.726.000,00	
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	70,00	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	70,00	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	6.74:6.74	6.75:6.75	6.75:6.75		6.75:6.75		6.75:6.75		6.75:6.75		6.75:6.75		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.199.560.050,00		1.307.520.000,00		1.425.197.000,00		1.553.465.000,00		1.693.276.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	75,00	75,00	75,00	1.199.560.050,00	75,00	1.307.520.000,00	75,00	1.425.197.000,00	75,00	1.553.465.000,00	75,00	1.693.276.000,00	
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	20,00	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	80,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (%)	80,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	80,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	40,00	42,00	44,00		46,00		48,00		50,00		52,00		
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%)		100			100		100		100		100		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					644.947.700,00		702.992.000,00		766.262.000,00		835.225.000,00		910.396.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100,00	100,00	100,00	644.947.700,00	100,00	702.992.000,00	100,00	766.262.000,00	100,00	835.225.000,00	100,00	910.396.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		KET.
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TOTAL KESELURUHAN					281.667.450.000,00		299.459.640.000,00		312.087.045.000,00		325.631.418.000,00		342.653.949.000,00	

Sumber: Diolah

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Pengembangan Rumah Sakit	
		Terpenuhi Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
		Persentase Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten yang disediakan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)		
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro Tradisional yang dikeluarkan	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
		Persentase Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan :	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
		Persentase pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Persentase Puskesmas yang menerapkan Germas	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Sumber: Diolah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Kesehatan Kab. Katingan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing

memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan										
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,03	70,11	71,19	72,27	73,34	74,42	75,5	
2.	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	
3.	Jumlah Kematian Balita	Jumlah	20	25	24	23	22	21	20	
4.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	19,6	19,1	18,25	17,4	16,55	15,7	14,85	
5.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	98,42	98,5	98,93	99	99,5	99,8	100	
6.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	44,56	54,3	64,04	73,78	83,51	93,25	102,99	
7.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	68,06	73,1	78,14	83,18	88,21	93,25	98,29	

Sumber: Diolah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas Kesehatan Kab. KatinganKabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
3.	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
4.	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
5.	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
6.	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
7.	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	6,00	5,80	5,60	5,40	5,20	5,00	4,80	
8.	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
9.	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
11.	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	22,50	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	
13.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
14.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
16.	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	60,00	75,00	85,00	90,00	95,00	98,00	100,00	
17.	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	
18.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
19.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	50,00	0,00	0,00	66,66	100,00	0,00	0,00	
20.	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	0,00	60,00	62,00	64,00	66,00	69,00	71,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	9,00	8,80	8,50	8,30	8,00	7,70	7,40	
22.	Penemuan Kasus TBC	%	70,00	75,00	80,00	83,00	86,00	88,00	90,00	
23.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
24.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
25.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
26.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
29.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
30.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
35.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	6.74	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	
37.	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38.	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persentase	81,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
39.	Cakupan Imunisasi HPV	Persentase		90	90	90	90	90	90	

Sumber: Diolah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Katingan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kab. Katingan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Katingan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan,

penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Katingan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Katingan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Kesehatan Kab. Katingan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.